

SKRIPSI

PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG BERDASARKAN SISTEM

PEMERINTAHAN DI INDONESIA

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FAJRIEKASAPTA JULIANANDA

2110111049

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.HI., LL.M**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 15/PK-V/IV/2025

PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG BERDASARKAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

(Fajri Ekasapta Juliananda, 2110111049, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 103 Halaman, Tahun 2025)

ABSTRAK

Pengisian jabatan dan kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dengan pemerintahan daerah. Pengisian jabatan kepala daerah ini dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan umum namun apabila terjadinya kekosongan jabatan diatur terpisah dari pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penerapan prosedur pengisian jabatan dan prosedur penisian kekosongan jabatan yang sudah banyak di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengaturan yang pasti di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara *civil law* yang menerapkan hukum utama berdasarkan peraturan perundang-undangan (tertulis), dan tidak ada satu ppengaturan yang jelas mengaturnya. Dalam konteks ini, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini mencakup dua aspek utama. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Prosedur Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota. *Kedua*, Untuk Menganalisis Prosedur pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi Pustaka. Studi Dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan mencari informasi yang nyata melalui data tertulis menggunakan *Content Analysis*, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu dan sebagainya. Hasil penelitian adalah *pertama*, menyatakan bahwa prosedur pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pengaturannya diatur oleh banyak peraturan perundang-undangan mulai dari Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 sampai dengan yang berlaku sekarang yakni Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016. *Kedua*, pengisian kekosongan jabatan kepala dan kepala daerah pengaturannya diatur oleh banyak peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sampai dengan yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 .